



DINAMIKA MASYARAKAT PERBATASAN (Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies)¹

THE DYNAMICS OF BORDER SOCIETY (The Existence of Bugis Migrants in Sebatik Island North Kalimantan: Perspective of Cultural Studies)²

Muhammad Hairul Saleh

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Email:chilue1973@gmail.com

Abstract

This article basically aim to give a description about the existence of Bugis migrants on the Sebatik island by focusing on the ability of Bugis migrants in creating and managing the economic resources linked with the talent to build relationships, both economically and socially as an effort to participate in the development of Sebatik Island. The research method used is descriptive qualitative, in which data and related information are collected through literature study and empirical research that are concerned about the border's issues, particularly the border of Indonesia and Malaysia. Another technique used is depth interviews with the Bugis migrants. These studies suggest that Bugis migrants in Sebatik Island are immigrants who have a dream to improve their living standards. With the principle of "hard work will bring maximum results" and supported by the ability to survive and always prepared to face the challenge, Bugis migrants has controlled most economic resources and become an important actor for the existence of society and development in Sebatik Island. Interaction among fellow of Bugis migrants in Sebatik Island, as well as interaction with immigrants from other regions and indigenous people, is the social capital that is crucial for the success of the Bugis migrants in Sebatik Island.

Keywords : *Sebatik Island, Bugis Migrants, Border Communities, Social Dynamics*

Abstrak

Artikel ini pada dasarnya ingin memberikan gambaran mengenai eksistensi perantau Bugis di Pulau Sebatik dengan fokus pada kemampuan

¹ Naskah diterima pada 08 Oktober 2014, revisi pertama pada 29 Januari 2015, revisi kedua pada 05 Februari 2015, disetujui terbit pada 06 Februari 2015



perantau Bugis dalam menciptakan dan mengelola sumber-sumber ekonomi yang dibarengi dengan kemampuan membangun relasi, baik ekonomi maupun sosial sebagai upaya turut berpartisipasi dalam pembangunan di Pulau Sebatik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana untuk mendapatkan data dan informasi terkait, dilakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dari buku-buku dan tulisan-tulisan hasil penelitian yang *concern* dengan perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Teknik lain yang digunakan adalah melalui wawancara dengan warga perantau Bugis yang menjadi pelaku. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Migran Bugis di Pulau Sebatik merupakan perantau-perantau yang memiliki mimpi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan memegang teguh prinsip “kerja keras akan membawa hasil yang maksimal” serta didukung oleh kemampuan untuk bertahan dan selalu siap menghadapi tantangan menjadikan Perantau Bugis sebagian besar menguasai sumber-sumber ekonomi dan menjadi aktor penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan pembangunan di Pulau Sebatik. Interaksi antar sesama perantau Bugis di Pulau Sebatik, serta interaksi dengan perantau dari wilayah lain dan masyarakat asli, merupakan modal sosial yang sangat menentukan bagi kesuksesan perantau Bugis di Pulau Sebatik

Kata Kunci : Pulau Sebatik, Perantau Bugis, Masyarakat Perbatasan, Dinamika Sosial

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini pada dasarnya merupakan 'kajian budaya' (*cultural studies*) bukan 'kajian tentang kebudayaan' (*the study of culture*). Jenks mengemukakan bahwa *cultural studies* dan *the study of culture* tidak sejalan, tetapi kajian tentang kebudayaan yang mencakup kajian budaya berasal dari beragam pemikiran dan konsep yang sudah ada sebelumnya serta tradisi filsafat dari pembentukan teori sosial (Jenks, 2013: 224). *Cultural studies* merupakan suatu pembentukan wacana, yaitu kluster gagasan-gagasan, citra-citra dan praktek-praktek yang menyediakan cara-cara untuk membicarakan topik, aktivitas sosial tertentu atau arena institusional dalam masyarakat. Cara-cara tersebut dapat berbentuk pengetahuan dan tindakan yang terkait (Barker, 2013: 6).

Kajian tentang komunitas masyarakat di perbatasan antar negara

dengan segala keunikannya menjadi bagian dari konsep kekuasaan dalam *cultural studies*. Konsep kekuasaan sendiri merupakan salah satu diantara konsep-konsep kunci *cultural studies* yang memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok pinggiran yang berkaitan dengan persoalan kelas, ras, gender, kebangsaan, kelompok umur dan lain-lain (Barker, 2013: 11). Posisi masyarakat perbatasan yang berada di pinggiran dan menjadi kelompok pinggiran (*marginal*) menjadi sangat dinamis karena di satu sisi berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, dan di sisi lain setiap saat melakukan interaksi dengan masyarakat negara tetangga.

Dengan posisi ini, maka tidak mengherankan jika interaksi sosial yang terjadi menjadi sangat cair dan tidak dipengaruhi oleh batas administrasi negara, apalagi jika masyarakat tersebut memiliki kesamaan etnis dan ikatan kekerabatan



yang kuat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bannet bahwa '*cultural studies* terkait dengan semua praktik, institusi dan sistem klasifikasi tempat tertanamnya nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, kompetensi-kompetensi, rutinitas kehidupan dan bentuk-bentuk kebiasaan perilaku suatu masyarakat' (Barker, 2013: 8). Lebih lanjut Bennett mengemukakan bentuk-bentuk kekuasaan yang dieksplorasi oleh *cultural studies* sangat beragam, termasuk gender, ras, kelas, kolonialisme dan lain-lain. *Cultural studies* berusaha mengeksplorasi hubungan antara bentuk-bentuk kekuasaan dan berusaha mengembangkan cara berpikir tentang kebudayaan dan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah agen dalam upayanya melakukan perubahan.

Dalam kasus masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik, perantau Bugis yang mayoritas menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial masyarakat yang hidup berdampingan dengan etnis lain penduduk Pulau Sebatik. Toleransi antar umat yang berbeda agama terjaga dengan baik, dimana masing-masing menjalankan agama dan keyakinan tanpa ada gangguan dari pihak lain. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat menyadari betul bahwa dengan toleransi akan membuat suasana menjadi tenang dan damai, yang secara otomatis akan mendukung dinamika kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini pada dasarnya ingin memberikan gambaran mengenai

eksistensi perantau Bugis di Pulau Sebatik dengan lebih fokus pada uraian tentang kemampuan perantau Bugis dalam menciptakan dan mengelola sumber-sumber ekonomi yang dibarengi dengan kemampuan membangun relasi, baik ekonomi maupun sosial sebagai upaya untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Pulau Sebatik. Upaya ini merupakan wujud tanggung jawab sebagai warga Sebatik yang telah memperoleh penghidupan lebih baik di perantauan.

Untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan tulisan ini, dilakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dari buku-buku dan tulisan-tulisan hasil penelitian yang *concern* dengan perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Teknik lain yang digunakan adalah melalui wawancara dengan warga perantau Bugis yang menjadi pelaku. Dengan wawancara, diharapkan dapat mengungkap informasi dan fakta nyata tentang kehidupan di Pulau Sebatik.

C. KONSEP PERBATASAN

Secara umum, perbatasan dipahami sebagai garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya, perbatasan sebuah negara atau *state's border* dibentuk dengan lahirnya negara. Penduduk yang tinggal di wilayah tertentu sebelumnya tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kemasyarakatan negara yang berbeda (Zain, 2010: 233).

Menurut Martinez, sebagaimana yang dikutip oleh



Ri w a n t o T i r t o s u d a r m o mengkategorikan ada empat tipe perbatasan:

1. *Alienated borderland* : suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
2. *Coexistent borderland* : suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bias ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.
3. *Interdependent borderland* : suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relative stabil. Penduduk di kedua bagian perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.
4. *Integrated borderland* : suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat (Suyatno, 2010: 138).

Pada umumnya wilayah perbatasan termasuk kategori daerah tertinggal karena berbagai faktor, misalnya lokasi yang relatif terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang relatif masih rendah, serta keterbatasan sarana dan prasarana (Abubakar, 2006: 127). Ironisnya, wilayah perbatasan ini merupakan pintu-pintu masuk (*border gates*), bila tidak dikelola secara baik akan berpotensi menimbulkan permasalahan kompleks antara dua negara yang berbatasan.

Pada sisi lain, perbatasan sering menjadi problem serius dalam hubungan antar negara. Salah satu masalah yang sering mengemuka dan menyita banyak perhatian sampai sekarang adalah masalah batas wilayah. Problem batas wilayah ini dapat berupa konflik tapal batas, penyelundupan, pelanggaran lintas batas (kasus TKI illegal), terorisme, *illegal logging* (pembalakan kayu secara liar), *illegal fishing* (penangkapan ikan secara liar), *trafficking* dan masih banyak yang lain (Saleh, 2010: 2). Problem-problem tersebut biasanya beriringan dengan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi seolah karakteristik dari masyarakat di perbatasan.

Realita Sebuah Pulau di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Terdapat satu pulau yang berbatasan langsung dengan wilayah negara bagian Sabah Malaysia di



wilayah provinsi Kalimantan Utara Indonesia, yakni Pulau Sebatik². Garis batas dengan sistem astronomi membagi dua Pulau Sebatik berupa garis lintang 4° 10' LU (Suburi, 2010: 119). Penanda batas wilayah yang masih ada sampai sekarang berupa patok beton. Patok ini menjadi tanda wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang ditentukan berdasarkan konvensi antara pemerintah penjajah kedua negara, yakni Inggris dan Belanda. Tahun 1891 dikenal dengan Konvensi London dan tahun 1915 disebut dengan Protokol London. Dalam konvensi tersebut ditetapkan bahwa batas wilayah laut dan darat antara Belanda dan Inggris terletak pada garis paralel 4° 10' LU. Wilayah bagian Utara merupakan wilayah Inggris dan Selatan adalah wilayah Belanda (Abubakar, 2006: 87).

Pulau Sebatik adalah pulau dua negara, Indonesia dan Malaysia. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar NKRI terletak di wilayah utara Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Tawau-Malaysia. Jaraknya sekitar 5 mil laut yang dapat ditempuh selama 15 menit dari Tawau dengan menggunakan speed boat (Saleh, 2010: 9). Pulau Sebatik sering dilupakan meski sering dikunjungi oleh para elit negeri, mulai dari presiden hingga pejabat daerah. Pulau Sebatik dapat dikatakan sebagai wilayah perbatasan yang masih tertinggal, khususnya pembangunan infrastruktur dibandingkan daerah lain, sehingga terkesan masih terbelakang. Ini

berbanding lurus dengan kehidupan masyarakatnya yang secara ekonomi masih tertinggal.

Keberadaannya seolah-olah tak dihiraukan tatkala situasi negeri ini tenang-tenang saja yang jauh dari hiruk pikuk spekulasi politik. Ia baru akan sontak menjadi fokus perhatian dan perbincangan hangat seluruh elemen masyarakat se-nusantara tatkala terjadi insiden, semisal konflik di perbatasan antara TNI dengan tentara Diraja Malaysia, pengusiran (deportasi) TKI oleh pemerintah Malaysia melalui pintu Nunukan dan berbagai peristiwa lain yang “katanya” melibatkan patriotisme dan nasionalisme bangsa.

Bila kita menginjakkan kaki di Pulau Sebatik, ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati, misalnya Pulau Sebatik secara administratif terbagi dua, sebelah Utara masuk wilayah Malaysia dan Selatan wilayah Indonesia. Hal lainnya, terdapat beberapa rumah yang terbagi dua pula, dapur masuk Malaysia dan ruang tamu masuk Indonesia. Istilah lain dari rumah ini adalah “rumah dua negara”. Selain itu, tidak kalah menariknya adalah ketika mencoba menyoroti lebih jauh tentang dinamika sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang mendiami Pulau Sebatik.

Pertama, dari sisi ekonomi, terdapat ketimpangan tingkat kehidupan atau kesejahteraan masyarakat Pulau Sebatik dibandingkan masyarakat Malaysia yang ada di perbatasan. Mata uang yang lazim digunakan oleh masyarakat adalah ringgit dan rupiah. Ringgit menjadi mata uang dominan,

2 Menurut catatan sejarah, pulau Sebatik merupakan salah satu tempat terjadinya pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Malaysia saat konfrontasi tahun 1963 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (Lihat, Saleh, 2010: 22)



sedangkan Rupiah menjadi mata uang “alternatif” (Saleh, 2010: 9) yang hanya digunakan sebagai pelengkap bertransaksi khusus untuk jual beli barang produk Indonesia yang jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan barang produk Malaysia. Penguasaan perputaran ringgit dan rupiah lebih banyak dikendalikan oleh pengusaha atau pedagang yang berlatar belakang etnis Bugis.

Kedua, dari sisi sosial, interaksi antara masyarakat perantau di Pulau Sebatik dengan masyarakat perantau di Tawau-Malaysia sangat cair karena adanya ikatan kekerabatan yang kuat sebagai kerabat atau keluarga dari daerah asal di Sulawesi Selatan. Selain itu, interaksi dengan masyarakat dari etnis lain sesama penduduk Pulau Sebatik berjalan cukup harmonis dan dinamis. Konflik antar etnis terkait dengan kecemburuan sosial tidak pernah mengemuka karena telah terjalin rasa saling menghargai antara satu dengan yang lain (Saleh, 2010: 33). Modal sosial ini kemudian menjadi instrumen yang menunjang keberhasilan perantau Bugis dalam menjalankan peran sebagai bagian dari aktor pembangunan Pulau Sebatik.

Ketiga, sisi budaya, mayoritas penduduknya adalah masyarakat Bugis yang merupakan perantau asal Sulawesi Selatan. Berbeda dengan wilayah perbatasan lain di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat asli setempat (masyarakat lokal). Karena mayoritas, maka secara otomatis budaya dan kebiasaan dari kampung halaman di Sulawesi Selatan

turut mewarnai pola kehidupan masyarakat di Pulau Sebatik, misalnya bahasa yang banyak digunakan sehari-hari adalah bahasa Bugis.

Dari sudut pandang *cultural studies*, letak Pulau Sebatik yang menjadi pulau terluar Indonesia di wilayah Utara pulau Kalimantan menunjukkan bahwa pulau dengan segala isinya ini dapat dikategorikan sebagai “kelompok pinggir” dari negara Indonesia yang penuh dengan keterbatasan. Pulau Sebatik kemudian menjadi arena institusional dari aktifitas sosial masyarakat dari berbagai etnis yang mendiami pulau ini.

a. Ringgit dan Rupiah

Rutinitas sehari-hari masyarakat Pulau Sebatik dilakoni dengan menggunakan dua mata uang, ringgit dan rupiah. Mata uang rupiah biasa diistilahkan oleh masyarakat Pulau Sebatik dengan sebutan “indon”³. Ringgit dan rupiah dimaknai oleh masyarakat Pulau Sebatik sebagai simbol eksistensi mereka di dua negara, Malaysia dan Indonesia. Ringgit merupakan alat tukar utama dalam bertransaksi dan menjadi primadona, sedangkan rupiah justru sebaliknya jarang digunakan (Saleh, 2010: 52). Hal ini sangat dimungkinkan karena maraknya produk-produk buatan Malaysia yang beredar dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Meski demikian ada kalangan yang melihat bahwa penggunaan uang ringgit di perbatasan dapat dilihat sebagai tindakan a-nasionalist (Lumenta, 2012: 155).

3 Sebagian besar masyarakat memaknai Indon sebagai sebutan orang Malaysia kepada orang Indonesia di Malaysia dan istilah untuk mata uang rupiah. Indon biasanya memiliki konotasi yang rendah karena menunjukkan perbedaan status antara orang Malaysia dengan orang Indonesia. Indon sudah menjadi konstruksi orang Malaysia dan Indonesia tanpa melihat batasan-batasan etnis. Istilah indon sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat (lihat Saleh, 2010: 53)



Terlepas dari anggapan tersebut, kebiasaan masyarakat menggunakan ringgit memang telah berlangsung sejak dulu ketika Pulau Sebatik mulai ramai disinggahi oleh para perantau yang mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan. Keengganan masyarakat menggunakan rupiah memang cukup beralasan karena mayoritas barang-barang kebutuhan pokok dari Tawau-Malaysia didatangkan dengan menggunakan harga ringgit, sehingga untuk menjualnya pun harus dengan ringgit agar tidak mengalami kerugian. Sekedar perbandingan, 1 Ringgit Malaysia oleh masyarakat biasanya disetarakan dengan Rp. 3.500, bahkan kadang-kadang lebih dari itu, tergantung fluktuasi Rupiah terhadap Ringgit pada saat itu.

Berdasarkan penuturan salah seorang warga,⁴ masyarakat Pulau Sebatik lebih memilih barang produksi Malaysia karena secara ekonomis harganya lebih murah dan mudah didapat. Biasanya, barang-barang produksi Indonesia didatangkan dari Tarakan dan Nunukan yang jaraknya lebih jauh dengan harga yang relatif lebih mahal akibat tingginya biaya transportasi pengiriman barang. Hukum ekonomi yang biasa kita dengar bahwa jika di suatu tempat barang melimpah, hargapun akan murah, sepertinya berlaku di Pulau Sebatik untuk barang-barang produksi Malaysia. Sebagai perbandingan, jarak tempuh dari Pulau Sebatik ke Tawau hanya 15 menit dengan menggunakan speed boat, sedangkan dari Pulau Sebatik ke Tarakan sekitar 3 jam. Faktor harga inilah yang kemudian

“memaksa” masyarakat untuk tetap setia memilih dan menggunakan barang Malaysia ketimbang barang Indonesia.

Ringgit menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Pulau Sebatik. Bagi mereka, ringgit bukanlah mata uang asing layaknya ringgit di wilayah Indonesia lainnya. Justru dapat dikatakan bahwa secara langsung Malaysia telah menghadirkan sebuah geliat ekonomi di Pulau Sebatik. Tidak dapat disangkal jika pertumbuhan ekonomi Pulau Sebatik sangat dipengaruhi oleh peredaran ringgit, bukan rupiah. Ringgit membuat segala aktivitas masyarakat menjadi lancar dan berjalan seiring dengan terpenuhinya segala yang mereka butuhkan (Saleh, 2010: 53).

Ringgit telah memegang peran yang sangat menentukan bagi masyarakat Pulau Sebatik, bahkan keberadaannya sangat mendominasi kehidupan masyarakat. Ringgit pada akhirnya menjadi “penguasa” di Indonesia, dan masyarakat Pulau Sebatik sepertinya sudah terbiasa dengan sistem ini, bahkan justru menjadi bagian dari langgengnya penguasaan itu. Monopoli ringgit terhadap rupiah mengindikasikan sebuah penguasaan berkesinambungan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat yang selama ini terjadi di perbatasan.

Dominannya penggunaan ringgit oleh masyarakat di Pulau Sebatik mengakibatkan rupiah menjadi terpinggirkan di negara sendiri. Sadar atau tidak, fenomena ini memang tidak bisa dielakkan karena hukum pasar memainkan perannya dalam sebuah

4 Wawancara tanggal 2 Februari 2015



proses ekonomi. Pasar-pasar tradisional di Pulau Sebatik yang dibanjiri oleh produk-produk Malaysia memang seharusnya menggunakan ringgit sebagai alat tukar untuk mempertahankan keberlangsungan proses jual beli, agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan murah.

Mekanisme pasar di Pulau Sebatik mengharuskan masyarakat untuk “menomorduakan” rupiah agar tidak rugi. Menurut keterangan salah seorang warga⁵, penulis menemukan informasi bahwa dengan mekanisme pasar yang berlaku selama ini menyebabkan masyarakat harus “menafikan” rupiah. Sebagai masyarakat biasa, kemudahan akses untuk mendapatkan barang produksi Malaysia melalui Tawau serta sulitnya barang produksi Indonesia merupakan faktor utama yang mempengaruhi animo masyarakat terhadap barang Indonesia. Sebaliknya, untuk barang Malaysia, mereka cukup menyiapkan ringgit, semua kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan mudah dan cepat.

Dengan fakta ini, tidaklah mengherankan jika berkunjung ke Pulau Sebatik, kita akan mendengar plesetan lagu yang berbunyi “Garuda di dadaku, Ringgit di kantongku”. Kalau kita memaknai lebih dalam plesetan tersebut, sesungguhnya menjadi potret yang sangat memprihatinkan atas kondisi wilayah yang berada di perbatasan. Secara ekonomi, masyarakat “terjajah” oleh negara tetangga, Malaysia, yang peredaran barang-barangnya mendominasi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ringgit pada akhirnya menjadi idola

yang memarginalkan rupiah sebagai alat tukar.

a. Pulau Sebatik dan Ketergantungan Pada Malaysia

Ketergantungan pada Malaysia adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat Pulau Sebatik. Ketertinggalan ekonomi merupakan problem sosial utama yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Pulau Sebatik. Kesenjangan antara Pulau Sebatik dengan Tawau-Malaysia menjadi pemicu orientasi ekonomi masyarakat lebih ke negara tetangga (Saleh, 2010: 60). Kalau mau jujur, sebenarnya keadaan ekonomi masyarakat yang tertinggal ini pada dasarnya diakibatkan oleh kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Menurut Nurrachman (2004: 19), keadilan sering digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Kalau kebijakannya tidak pro rakyat, maka dapat dikategorikan pemerintah tidak adil kepada rakyatnya.

Ketergantungan secara ekonomi masyarakat Pulau Sebatik dengan negara tetangga Malaysia memang menjadi sebuah problem tersendiri. Ketergantungan yang dimaksud seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berupa peredaran barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang didominasi oleh barang produksi Malaysia. Akibatnya, ringgit yang merupakan mata uang Malaysia menjadi alat tukar yang utama. Disamping itu, hasil-hasil perkebunan masyarakat seperti, kelapa sawit,

5 Wawancara tanggal 3 Februari 2015



coklat, pisang semuanya dipasarkan ke Tawau-Malaysia. Di sisi lain, tidak sedikit pula masyarakat bekerja dan mencari kehidupan di Malaysia. Gambaran singkat ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi masyarakat memang sangat tergantung pada Tawau-Malaysia.

Uniknya, masyarakat menganggap bahwa ketergantungan ekonomi kepada Malaysia adalah hal biasa dalam kehidupan mereka. Salah seorang warga menuturkan bahwa masyarakat di Pulau Sebatik sudah terbiasa melakukan aktifitas perekonomian ke Tawau-Malaysia. Misalnya, menjual hasil pertanian dan perkebunan ke Tawau, kemudian hasilnya dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari yang semuanya barang Malaysia. Kalau membeli barang Indonesia biasanya agak mahal⁶. Dari penuturan tersebut, menurut hemat penulis, jika diselami lebih jauh sikap ini bisa bermakna dua, memang hal biasa atau wujud dari sebuah "keputusan" atas kondisi mereka di perbatasan yang jauh dari perhatian negara. Dengan demikian, bukan tidak mungkin, sinyalemen beberapa kalangan bahwa kuatnya ketergantungan kepada Malaysia dapat berpotensi memunculkan ancaman serius berupa tergerusnya nasionalisme di perbatasan benar adanya.

Masyarakat yang tinggal di Pulau Sebatik memang sebuah paradoks. Di satu sisi mereka dituntut untuk senantiasa menjaga rasa nasionalisme, sementara di sisi lain hasil-hasil pembangunan sering tidak berpihak pada mereka. Pembangunan

yang ada selama ini pada kenyataannya tidak memperhitungkan kondisi masyarakat setempat. Sejatinnya, pendekatan pembangunan di perbatasan seharusnya didesain untuk menciptakan peningkatan aspek ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Pendekatan yang ada sudah seharusnya menitikberatkan pada pentingnya partisipasi penduduk, berorientasi kebutuhan, keswadayaan, peningkatan kesadaran, perencanaan *bottom-up*, dan pemberdayaan masyarakat (Ali, 2007: 84). Dengan demikian pembangunan yang ada harus berorientasi pada "apa yang dimau oleh masyarakat", bukan pada "apa yang dimau oleh pemerintah".

Disadari atau tidak, ketergantungan ini telah terjadi sekian lama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Keseharian yang dilakoni dengan tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi kepada Malaysia secara langsung telah mempengaruhi pola hidup mereka. Beberapa indikator yang dapat dilihat sebagai ancaman luntarnya jiwa nasionalisme masyarakat salah satunya adalah dengan adanya masyarakat yang memiliki kewarganegaraan ganda atau berkepala dua⁷ (Saleh, 2010: 63). Masyarakat memilih untuk memiliki kewarganegaraan ganda agar dapat mengatasi kesulitan mengakses fasilitas kebutuhan dasar yang oleh Indonesia masih sangat terbatas pemenuhannya bagi masyarakat.

Sebuah gambaran sederhana dapat dikemukakan bahwa meski menjadi bagian dari Indonesia, namun

6 Wawancara tanggal 03 Februari 2015

7 Berkepala dua adalah istilah yang biasa digunakan bagi masyarakat yang memiliki kewarganegaraan ganda (memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Identity Card (IC) Malaysia)



secara ekonomi masyarakat menjadi bagian Malaysia. Realitas menunjukkan, tingkat ketergantungan ini melahirkan sebuah sistem perdagangan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menjadikan ringgit sebagai alat tukar utama dan rupiah yang merupakan salah satu identitas negara lambat laun tercampakkan di negaranya sendiri di tengah dominasi ringgit.

Ketergantungan masyarakat Pulau Sebatik pada Malaysia yang masih berlangsung hingga sekarang, sesungguhnya merupakan akibat dari belum maksimalnya hasil pembangunan menjangkau pulau ini. Masih terbatasnya pasokan bahan pokok produksi Indonesia ke Pulau Sebatik semakin memperkuat ketergantungan tersebut. Keadaan ekonomi yang sulit di tengah meningkatnya biaya (*cost*) kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi dengan mudahnya mengakses barang pokok dari negara tetangga, Malaysia, dengan harga yang lebih murah, memaksa masyarakat untuk tetap "setia" menjadi pelanggan Malaysia. Hampir semua kebutuhan pokok, seperti beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, bumbu dapur, gas elpiji dan lain-lain dipasok dari Tawau-Malaysia.

Bila dikaji lebih jauh mengapa ketergantungan tetap "langgeng", maka akan ditemukan jawaban: *Pertama*, barang-barang yang diperdagangkan mayoritas adalah barang produksi Malaysia. *Kedua*, karena barang yang ada adalah barang Malaysia, maka secara otomatis barang tersebut diperjualbelikan dengan harga ringgit bukan rupiah. *Ketiga*, jarak Pulau Sebatik yang dekat dengan

Tawau-Malaysia dari pada ke Nunukan-Indonesia. *Keempat*, karena dekatnya jarak, maka secara otomatis mobilitas masyarakat ke Malaysia juga semakin tinggi.

Ketergantungan terhadap Malaysia di satu sisi memang merugikan Indonesia dalam konteks perekonomian bangsa secara umum karena negara kehilangan sumber-sumber ekonomi di perbatasan, namun di sisi lain ketergantungan ini sangat menguntungkan masyarakat Pulau Sebatik secara ekonomi. Apa jadinya kalau aktifitas perdagangan ke Tawau tidak terjadi, mungkin pulau ini akan mati tanpa denyut perekonomian. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya Malaysia punya andil yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di Pulau Sebatik.

Harus diakui, Malaysia telah memberikan nafas kehidupan di Pulau Sebatik, dan inilah "nilai" dari ketergantungan yang dirasakan oleh komunitas masyarakat pinggiran di perbatasan Indonesia-Malaysia. Bisa dibayangkan kalau seandainya tidak ada Tawau-Malaysia sebagai tempat aktifitas ekonomi masyarakat, mungkin Pulau Sebatik tidak akan seperti sekarang, dan itu artinya, Malaysia telah menjadi oase di tengah "dahaga" masyarakat. Wajar kalau kemudian ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sepertinya tidak berpengaruh signifikan pada kehidupan masyarakat. Justru ketika ekonomi Malaysia mengalami krisis barulah berimbas kepada mereka. Keadaan seperti ini memang sudah dijalani masyarakat sejak dahulu.

Rutinitas masyarakat sehari-hari yang sangat tergantung pada Malaysia merupakan praktek



kebudayaan. Dalam pandangan *cultural studies*, ini merupakan aktifitas sosial yang berfokus pada pengalaman sehari-hari. Raymond Williams mengembangkan suatu pemahaman yang menekankan karakter keseharian kebudayaan sebagai “keseluruhan cara hidup”. Konsep ini adalah konsep antropologis karena terpusat pada makna sehari-hari berupa nilai, norma, dan benda-benda material/symbolis. Makna dibangun bukan secara individual namun secara kolektif, sehingga gagasan kebudayaan mengacu pada makna yang dimiliki bersama (Barker, 2013: 39-40). Dengan demikian kebudayaan dipahami sebagai masalah remeh-temeh kehidupan sehari-hari.

D. PEMBAHASAN **Eksistensi Perantau Bugis dan Geliat Perekonomian di Pulau Sebatik**

Migran Bugis di Pulau Sebatik merupakan perantau-perantau yang memiliki mimpi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan memegang teguh prinsip “kerja keras akan membawa hasil yang maksimal” serta didukung oleh kemampuan untuk bertahan dan selalu siap menghadapi tantangan kerasnya alam, pada awalnya para perantau Bugis ini menginjakkan kaki di Pulau Sebatik dengan berbagai macam profesi, diantaranya petani, nelayan, pedagang.

Pulau Sebatik yang sebelum disinggahi oleh para perantau Bugis adalah pulau yang jarang penduduknya. Menurut Lineton, salah satu karakteristik daerah tujuan migrasi orang Bugis umumnya adalah daerah yang jarang penduduknya (Tirtosudarmo, 2005: 163). Karenanya dapat dikatakan bahwa Pulau Sebatik

termasuk kategori permukiman para perantau Bugis di luar Sulawesi Selatan. Karakteristik lain adalah permukiman migran Bugis biasanya dekat dengan pelabuhan. Keberadaan perantau Bugis di Pulau Sebatik tidak bisa dipisahkan dengan permukiman Bugis di dekat pelabuhan Nunukan yang menjadi pintu masuk para perantau yang ingin mengadu nasib ke Malaysia.

Meski mayoritas secara kuantitas di Pulau Sebatik, etnis Bugis tidak pernah mengklaim wilayah yang ditempati adalah wilayah etnis mereka, seperti diklaim oleh etnis Kashmir di India dan Etnis Kurdi di Irak (Abdilah, 2002: 101). Etnis Bugis yang ada, tidak memiliki keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI layaknya etnis Kashmir dan etnis Kurdi. Hal ini dimungkinkan karena ikatan emosional sesama etnis Bugis tetap terjaga dengan baik meski berada di wilayah yang berbeda. Hubungan-hubungan ini masih terjaga dengan baik dengan satu harapan ikatan kekeluargaan sesama etnis Bugis tetap kuat di manapun berada (Saleh, 2010: 94).

Seiring dengan berjalannya waktu, dengan bermodalkan jiwa kewirausahaan yang kuat, banyak diantara para perantau Bugis ini kemudian membeli tanah dan memilih untuk menetap dan mengembangkan usaha di bidang ekonomi, pertanian dan perikanan dengan melakukan model perdagangan lintas batas antar negara. Setiap hari para pedagang memasarkan hasil perkebunan, seperti kelapa sawit, kakao, dan lain-lain ke Tawau memanfaatkan para pedagang pengumpul yang memiliki hubungan dagang dengan pedagang Tawau-Malaysia. Nelayan memasarkan hasil



tangkapan di laut langsung ke pasar-pasar di Tawau bahkan ke daerah-daerah lain di wilayah negara bagian Sabah.

Semua kegiatan perdagangan yang ada dilakukan dengan memanfaatkan jaringan yang sudah mapan yang terjalin sekian lama, dan mampu bertahan karena adanya saling ketergantungan diantara para aktor yang terlibat dalam jejaring tersebut. Misalnya, seperti penuturan salah seorang warga Bugis yang terbiasa melihat proses jual beli bahwa selama ini yang terjadi adalah para pedagang pengumpul di Pulau Sebatik memasarkannya ke Tawau dan masing-masing telah mempunyai relasi sendiri atau yang lebih dikenal dengan sebutan *toke*. Untuk memperlancar hubungan dagang tersebut, *toke* ini biasanya membantu para pedagang dalam hal permodalan jika pedagang membutuhkan suntikan dana.⁸

Untuk masuk wilayah Malaysia, selain paspor mereka biasa menggunakan pas lintas batas⁹ sebagai surat resmi yang disahkan oleh pihak imigrasi di Pulau Sebatik. Namun, menurut salah seorang warga, setahun belakangan ini pas lintas tidak lagi terlalu banyak digunakan ketika ingin melintas ke Malaysia mengingat ketatnya pengawasan. Kondisi ini memaksa masyarakat yang tidak memiliki paspor untuk segera memiliki paspor. Pengesahannya paspor harus dilakukan di kantor imigrasi Nunukan, karena kantor imigrasi Sungai Pancang yang ada di Pulau Sebatik tidak

melayani pengurusan paspor¹⁰.

Dengan sistem jejaring ini, tidaklah mengherankan kalau kemudian perantau Bugis lebih mendominasi sektor perekonomian dibandingkan dengan perantau-perantau lain dari NTT, Jawa dan yang lainnya. Solidaritas sesama perantau Bugis di perantauan dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dengan pembentukan jaringan-jaringan perdagangan berbagai komoditas dan usaha. Melalui jaringan ini, para perantau Bugis berusaha menjadikan Pulau Sebatik sebagai pulau yang benar-benar menjadi halaman depan NKRI dan memiliki masyarakat yang berdaya secara ekonomi, sehingga tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada Malaysia.

Tidak dapat disangkal bahwa sumber-sumber ekonomi di Pulau Sebatik sebagian besar dikuasai oleh perantau Bugis yang secara langsung telah memberikan kontribusi positif bagi terciptanya iklim perputaran ekonomi di wilayah perbatasan. Sebagai aktor-aktor yang memiliki peran penting dalam memajukan Pulau Sebatik, para perantau Bugis dengan filosofi “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” berusaha untuk melakukan pembenahan-pembenahan, khususnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan dengan didukung oleh struktur jejaring sosial yang kuat.

Peran strategis perantau Bugis pada sektor ekonomi di Pulau Sebatik

8 Wawancara tanggal 2 Februari 2015

9 Pas Lintas Batas memiliki kemiripan bentuk dengan paspor dan berwarna merah. Pas lintas batas hanya diperuntukkan bagi warga masyarakat Kabupaten Nunukan, termasuk Pulau Sebatik. Pas lintas batas hanya berlaku di Tawau saja, sehingga bagi mereka yang menggunakannya untuk melintas tidak boleh keluar dari kota Tawau. Masa berlaku pas lintas batas satu tahun sejak tanggal dikeluarkan dan bisa disahkan di Nunukan dan Pulau Sebatik

10 Wawancara tanggal 1 Februari 2015



tampaknya menguatkan kesimpulan yang pernah ditulis oleh Pelras dalam bukunya *The Bugis* (1996). Pelras menyimpulkan bahwa bagi orang Bugis, migrasi merupakan bagian dari strategi ekonomi-pasar (*a market-economy strategy*). Kesimpulan yang ditarik oleh Pelras ini didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Acciaioli (1998) yang melakukan penelitian pada migran Bugis yang bermukim di sekitar Danau Lindu, Sulawesi Tengah.

Acciaioli secara cermat melihat bagaimana migran Bugis cepat melakukan penyesuaian terhadap fluktuasi pasar yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan hasil pertanian tanaman keras yang diekspor. Kemampuan melakukan adaptasi dalam strategi ekonomi dan terhadap kecenderungan pasar, yang merupakan sikap dasar kewiraswastaan, meskipun merupakan gejala yang umum ditemukan pada kaum migran dari suku bangsa manapun, tampaknya dalam tingkat kecepatan yang dimiliki, migran Bugis sulit mendapatkan tandingan (Tirtosudarmo dan John Haba, 2005: 163).

Eksistensi perantau Bugis sebagai salah satu komunitas membuat perubahan signifikan pada kondisi di Pulau Sebatik. Dengan didukung oleh seluruh elemen masyarakat sesama perantau (NTT, Jawa dan lain-lain) serta masyarakat lokal (Tidung, dan Dayak), secara kasat mata telah mengubah wajah Pulau Sebatik dari yang dulunya berupa hutan belantara menjadi salah satu wilayah pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kalimantan Utara, khususnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pertumbuhan ekonomi baru yang dimaksud berupa geliat sektor

pertanian melalui perkebunan kelapa sawit, kakao, dan palawija yang menjadi komoditas andalan Pulau Sebatik.

Salah satu indikator yang dapat dilihat dari peran penting perantau Bugis dalam mengembangkan Pulau Sebatik adalah ketika wacana pemekaran Pulau Sebatik menjadi kabupaten atau kota yang terlepas dari Kabupaten Nunukan digaungkan sebagai solusi bagi ketertinggalan dengan wilayah lain di Indonesia. Para pengusaha Bugis yang mengendalikan sumber-sumber ekonomi di Pulau Sebatik memberikan dukungannya secara penuh baik materil dan moril dengan satu harapan kelak jika Sebatik menjadi daerah otonom, akan lebih mudah untuk melakukan pengembangan di segala sektor, khususnya pertanian yang menjadi primadona.

Keberadaan perantau Bugis dengan etnis-etnis lain yang mendiami Pulau Sebatik telah mewarnai dinamika sosial dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah realitas sosial masyarakat di perbatasan. Hidup berdampingan dengan budaya yang berbeda pada dasarnya memiliki makna tersendiri dalam proses interaksi sosial yang ada. Adanya perbedaan kebudayaan dari masing-masing etnis menjadikan bahasa Indonesia dengan dialek Melayu sebagai cara untuk memahami satu sama lain. Dengan demikian bahasa sebagai tanda telah memegang peranan penting dalam pembentukan makna dari proses interaksi yang terbangun selama ini.

Cultural studies menyatakan bahwa bahasa bukanlah media netral bagi pembentukan makna dan



pengetahuan tentang dunia obyek independen yang ada di luar bahasa, tapi ia merupakan bagian utama dari makna dan pengetahuan tersebut. Dalam hal ini, bahasa memberi makna pada obyek material dan praktek sosial yang dibebankan oleh bahasa kepada kita dan membuat kita bisa memikirkannya dalam konteks yang dibatasi oleh bahasa. Proses-proses produksi makna merupakan praktik signifikasi, dan memahami kebudayaan berarti mengeksplorasi bagaimana makna dihasilkan secara simbolis dalam bahasa sebagai suatu 'sistem signifikasi' (Barker, 2013: 9).

Relasi Sosial Perantau Bugis di Perantauan

Interaksi antar sesama perantau Bugis di Pulau Sebatik, serta interaksi dengan perantau dari wilayah lain dan masyarakat asli seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan modal sosial yang sangat menentukan bagi kesuksesan perantau Bugis dalam mengendalikan sumber-sumber ekonomi. Penguasaan ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang menjadi kunci bagi mereka sebagai agen perubahan sosial di perbatasan. Interaksi kemudian menjadi sarana utama untuk saling berbagi informasi sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi berkaitan dengan usaha atau kegiatan bisnis. Dari situlah kemudian akan dicari solusi secara bersama-sama untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga tidak berpengaruh pada iklim usaha yang sedang berjalan.

Perantau Bugis yang mengendalikan sumber-sumber

ekonomi biasanya menjalin hubungan bisnis dengan sesama perantau sampai ke wilayah Sabah-Malaysia untuk mengembangkan usaha. Untuk bisa mengakses sampai ke Malaysia, mereka biasanya berupaya untuk mendapatkan kartu tanda penduduk Malaysia atau yang dikenal dengan IC (*identity card*), meski tidak mudah untuk mendapatkannya. IC biasa dimanfaatkan untuk memudahkan mobilitas dari dan ke Malaysia untuk menjalankan usaha.

Manfaat lain yang bisa diperoleh dengan kepemilikan IC ini adalah adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada warga negara kaitannya dengan pemberian subsidi atas barang-barang tertentu. Hal ini tentunya sangat menguntungkan mengingat barang-barang produk Malaysia yang dibeli dalam jumlah banyak dan akan dijual ke Indonesia, khususnya Pulau Sebatik tidak perlu membayar cukai. Strategi dagang seperti ini terbukti dapat membuahkan hasil yang maksimal.

Hubungan bisnis yang terjalin seringkali didasarkan pada pendekatan kekerabatan, yang mana dilandasi oleh sebuah kesadaran (*consciousness*) akan pentingnya saling membantu sesama kerabat di perantauan. Cara ini ternyata efektif untuk menciptakan suasana yang harmonis karena dilandasi rasa saling percaya (*trust*) diantara mereka. Kesadaran ini pada dasarnya dilandasi oleh filosofi yang selama ini dipegang teguh oleh perantau Bugis di perantauan, yakni filosofi "sipakatau"¹¹.

Sipakatau adalah sikap saling

11 *Sipakatau* berasal dari dua kata yakni; Sipak dan Tau. Kedua kata itu bersenyawa menjadi satu kata: Sipakatau. Tau lebih tepat jika diterjemahkan sebagai Manusia. Dalam konteks pengertian Sipakatau, maka melekat dua makna filosofis, sikap manusia dan sifat



memahami dan menghargai secara manusiawi atau dengan kata lain sikap saling memanusiakan sesama manusia. Budaya ini mengandung esensi nilai yang sangat luhur, dimana dengan Sipakatau kehidupan dapat mencapai keharmonisan, dan memungkinkan segala kegiatan kemasyarakatan berjalan dengan sewajarnya sesuai hakikat martabat manusia, yakni manusia yang tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan Sipakatau seluruh perbedaan derajat sosial dapat tercairkan, tak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pimpinan dan bawahan, turunan bangsawan dan rakyat biasa dan sebagainya. Yang dinilai atas diri seseorang adalah kepribadiannya yang dilandasi sikap budaya Sipakatau. Tanpa sikap Sipakatau, manusia akan menjadi seperti binatang yang kejam terhadap sesamanya hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat orang lain, kehilangan sifat manusianya.¹²

Dengan sipakatau, sekat-sekat administrasi antar negara di perbatasan kenyataannya tidak mempengaruhi pola kehidupan perantau Bugis di Pulau Sebatik. Sekat antar negara berupa batas wilayah justru menjadi keunikan tersendiri karena mobilitas lintas batas di perbatasan menjadi hal yang biasa dan sudah menjadi bagian dari aktifitas keseharian. Ikatan kekerabatan dan kekeluargaan sesama perantau Bugis di perantauan menjadi perekat bagi

penguatan jati diri dan eksistensi sebuah komunitas masyarakat Bugis di perbatasan.

Relasi Perantau Bugis dengan Sanak Keluarga di Kampung Halaman

Keberadaan suatu etnis perantau yang mendiami suatu tempat di perantauan sudah pasti akan selalu melakukan hubungan dengan keluarga dan kerabat yang ada di kampung halaman. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk senantiasa menjaga ikatan emosional diantara mereka meski terpisah jauh oleh jarak. Untuk maksud tersebut, biasanya mereka rutin berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* karena lebih hemat dan dapat dilakukan kapan dan di manapun. Upaya yang lain berupa saling berkirim oleh-oleh, atau bahkan menguatkan ikatan kekeluargaan melalui perkawinan.

Saling berkirim oleh-oleh biasanya dilakukan bila tidak sempat pulang kampung, khususnya pada momen-momen spesial, seperti mudik lebaran atau pernikahan kerabat dekat dan lain-lain sebagai tanda bahwa para perantau yang ada di Pulau Sebatik masih tetap merindukan kampung halaman. Mereka biasanya mengirim barang-barang kepada keluarga dan kerabat di kampung halaman seperti, baju, celana jeans, sepatu, milo dan lain-lain yang semuanya merupakan produksi Malaysia. Barang-barang produksi Malaysia ini biasanya

kemanusiaan. Suatu sikap pandang memanusiakan manusia, bukan meng-orang-kan manusia, namun dapat saja memanusiakan orang. Seorang dapat disebut Tau dalam pandangan filosofis jika memiliki sifat sebagai manusia. Ciri sifat manusia dalam konteks sebagai Tau jika selalu berkata baik (ada macedeng), sikap perilaku yang baik sesuai apa yang diucapkan. Sikap dan perilakunya merupakan ekspresi dari ucapannya. Operasionalisasi Sipakatau berwujud pada hubungan antar-manusia. Potensi dasar sebagai tau deceng diinteraksikan pada pihak lain dalam suatu tatanan pergaulan yang saling memahami dan menghargai. Sipakatau dalam artian ke-sederajatan, kebersamaan dan karena dirinya sebagai manusia maka orang lain pun juga dipandang sebagai manusia (Lihat Saleh, 2010: 33)

12 "Sipakatau Memanusiakan Manusia" dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2010/09/08/sipakataumemanusiakan-manusia-253200.html>, diakses pada tanggal 28 Maret 2014



menjadi rebutan di kampung halaman karena *image* yang ada di masyarakat bahwa barang tersebut kualitasnya bagus dan prestisius.

Hal lain yang biasa dilakukan untuk menjaga komunikasi dan relasi dengan kerabat di Sulawesi Selatan adalah dalam hal perkawinan. Setelah merasa cukup untuk menikah, biasanya perantau laki-laki kembali ke kampung halaman mencari wanita yang bakal menjadi istri, kemudian diboyong ke perantauan setelah menikah. Prosesnya, kadang laki-laki yang langsung pulang kampung, dan biasa juga melalui perantara pihak keluarga masing-masing. Kasus seperti ini menjadi tren karena pandangan yang ada pada sebagian masyarakat Bugis bahwa kalau seorang laki-laki Bugis telah "sukses" di perantauan, maka harus mengambil salah satu anggota keluarga di kampung agar keberhasilan yang ada menjadi dua orang. Asumsi seperti ini sampai sekarang masih banyak diamalkan.

Prinsipnya, jarak bukanlah sebuah kendala untuk senantiasa memelihara ikatan persaudaraan yang telah lama terjalin. Dalam banyak kasus, etnis Bugis yang telah sukses di perantauan cenderung memanggil keluarga di kampung halaman untuk ikut mereka. Paling tidak, keluarga yang ada di kampung halaman ikut merasakan kesuksesan yang telah diraih, dan ini merupakan kebanggaan tersendiri ketika mencapai kesuksesan di perantauan. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit etnis Bugis yang sukses di Pulau Sebatik bahkan di Tawau. Meskipun telah sukses di perantauan, namun kebanggaan sebagai etnis Bugis tetap terpelihara.

E. PENUTUP

Kasus masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik dalam konteks kehidupan sosial merupakan bagian dari kajian *cultural studies*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bannet bahwa "*cultural studies* terkait dengan semua praktik, institusi dan sistem klasifikasi tempat tertanamnya nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, kompetensi-kompetensi, rutinitas kehidupan dan bentuk-bentuk kebiasaan perilaku suatu masyarakat". Interaksi yang terbangun di Pulau Sebatik yang melibatkan etnis pendatang dan lokal, pada hakekatnya menunjukkan adanya relasi kuasa yang berorientasi pada perubahan sosial yang dapat memberi manfaat bagi mereka secara keseluruhan.

Penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh sebagian besar perantau Bugis tidak serta merta menunjukkan adanya dominasi ekstrim terhadap warga lainnya. Kecenderungannya justru adanya saling ketergantungan diantara mereka, mengingat sasaran dan tujuan dari interaksi yang terbangun selama ini tidak lain hanya untuk saling berbagi antara satu dengan lainnya, bahu membahu agar tetap bisa eksis di perbatasan tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang budaya atau kebiasaan. Perantau Bugis sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik telah menunjukkan eksistensinya dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab sosial yang dimiliki untuk tetap membangun dan menjaga keberlangsungan geliat ekonomi masyarakat menjadi pendorong utama bagi terciptanya sebuah masyarakat



perbatasan yang berdaya dan bermartabat di mata negara tetangga.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ubed. (2002). *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Yayasan INDONESIA TERATA. Magelang*
- Abubakar, Mustafa. (2006). *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, dan Sebatik*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta
- Ali, M. (2007). *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Averroes Press dan Prakarsa. Malang
- Barker, Chris. (2013). *Cultural Studies Teori dan Praktek*. Kreasi Wacana. Yogyakarta
- Fitriani, Evi (ed.). (2012). *Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Sosial, Budaya, Negara, dan Media (Kasus Perbatasan dan Pekerja Migran)*. UI Press. Jakarta
- Jenks, Chris. (2013). *Culture Studi Kebudayaan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Lumenta, Dave. (2012). *Membongkar Paradoks Epistemologi Negara Tentang Perbatasan, dalam Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Sosial, Budaya, Negara, dan Media (Kasus Perbatasan dan Pekerja Migran)*. UI Press. Jakarta
- Madu, Ludiro dkk. (2010). *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Nurrachman, N. (2004). *Keadilan dalam Perspektif Psiko-sosial, dalam Keadilan Sosial : Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Rauf, Maswadi. (2008). *Mengubah Karakter Bangsa Warisan Orde Baru, dalam Refleksi Karakter Bangsa*. Forum Kajian Antropologi Indonesia. Bogor
- Rudiatin, Endang. (2012). *Integrasi Ekonomi Lokal di Perbatasan (Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat Pulau Sebatik Kalimantan Timur, Di Perbatasan Indonesia-Sabah Malaysia)*. Disertasi Tidak dipublikasikan. Universitas Indonesia. Depok
- Saifuddin, Achmad Fedyani & Mulyawan Karim. (2008). *Refleksi Karakter Bangsa*. Forum Kajian Antropologi Indonesia. Bogor
- Saleh, Muhammad Hairul. (2010). *Nasionalisme Di Tapal Batas*. Interpena. Yogyakarta
- Suburi, Juni. (2010). *Kebijakan Pengelolaan Batas Antar Negara di Kalimantan dalam Konteks Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI, dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia



- Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Suyatno. (2010). *Globalisasi, Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Local Governance, dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Tirtosudarmo. (2005). *Nunukan Sebagai Wilayah Transit dalam Dari Entikong Sampai Nunukan : Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan - Malaysia Timur (Serawak dan Sabah)*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Tirtosudarmo, Riwanto dan John Haba (ed.). (2005). *Dari Entikong Sampai Nunukan : Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan - Malaysia Timur (Serawak dan Sabah)*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Zain, Siti Noorehan Mohd.(2010). *Perbatasan Malaysia-Indonesia di Kalimantan dan Komunikasi Politik, dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Website

- “Sipakatau Memanusiakan Manusia” dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2010/09/08/sipakatau-memanusiakan-manusia-253200.html>, (diakses pada tanggal 28 Maret 2014)
- <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0411/03/utama/1364367.htm>, (diakses pada tanggal 26 Pebruari 2014)

